



ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

ANALYSIS OF AVAILABILITY AND EQUALITY OF EDUCATIONAL FACILITIES IN MEDAN TEMBUNG DISTRICT

**Sahala Fransiskus Marbun¹, Claudya Carolin Sihombing², Rouli anastasia Sihombing³,
Rosa anjelina manik⁴, Dina Mendrofa⁵**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: sahala@unimed.ac.id¹, claudyacarolin1@gmail.com², Rosaanjelina260@gmail.com³,
roulianatasiasihombing2904@gmail.com⁴, dinanurrahmayantimendrofa@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 15-11-2025

Revised : 16-11-2025

Accepted : 18-11-2025

Published : 20-11-2025

Abstract

This study aims to analyze the suitability of educational facilities to the school-age population in Medan Tembung sub-district. As a peri-urban area that serves as a buffer for the city core, this sub-district faces dual pressures: rapid urbanization and high natural demographic growth. Amidst the implementation of the National Zoning System policy, which philosophically demands geometric proximity between students' residences and schools, supply-side infrastructure readiness is a determinant variable that is often overlooked in policy discourse. Using a quantitative descriptive approach combined with spatial analysis and Service Load Ratio calculation techniques, this study evaluates the gaping structural gap between demand (school-age population) and supply (public school capacity). Empirical findings reveal an extreme and systemic imbalance: of a total school-age population of 30,530 children, only 21 public education facilities are available. A critical ratio analysis reveals an unrealistic and inhumane service load, where in aggregate one public school must bear the potential service load of 1,453 students. The most severe and absolute deficit is found at the Vocational High School (SMK) level, with a total absence (0 units) of public schools. This situation creates a "public service blind spot" that effectively forces social exclusion for economically disadvantaged groups. This study concludes that the dominance of the private sector has shifted the paradigm of education in Medan Tembung from a public good guaranteeing equality to an exclusive market commodity. This has the potential to exacerbate social stratification, widen the gap in inequality, and permanently hinder the vertical mobility of low-income communities trapped in a cycle of structural poverty.

Keywords: Availability of Education, Critical Ratio, Medan Tembung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian fasilitas pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan medan tembung. Sebagai wilayah peri-urban yang berfungsi sebagai penyangga inti kota, kecamatan ini menghadapi tekanan ganda: arus urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan demografis alami yang tinggi. Di tengah implementasi kebijakan Sistem Zonasi nasional yang secara filosofis menuntut kedekatan jarak geometris antara tempat tinggal siswa dengan sekolah, kesiapan infrastruktur sisi penawaran (*supply-side readiness*) menjadi variabel determinan yang seringkali terabaikan dalam diskursus kebijakan. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dipadukan dengan analisis spasial dan teknik kalkulasi *Service Load Ratio* (Rasio Beban Layanan), penelitian ini mengevaluasi kesenjangan struktural yang menganga antara *demand* (populasi usia sekolah) dan *supply* (kapasitas sekolah negeri). Temuan empiris menyingkap sebuah ketimpangan yang ekstrem dan sistemik: dari total populasi usia sekolah sebanyak 30.530 anak, fasilitas pendidikan publik yang tersedia hanya berjumlah 21 unit. Analisis rasio kritis



mengungkapkan beban layanan yang tidak realistik dan tidak manusiawi, di mana secara agregat satu sekolah negeri harus menanggung beban layanan potensial terhadap 1.453 siswa. Defisit paling parah dan bersifat absolut ditemukan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan ketiadaan total (0 unit) sekolah negeri. Kondisi ini menciptakan "zona buta" layanan publik (*public service blind-spot*) yang secara efektif memaksa terjadinya eksklusi sosial bagi kelompok ekonomi lemah. Studi ini menyimpulkan bahwa dominasi sektor privat telah menggeser paradigma pendidikan di Medan Tembung dari barang publik (*public goods*) yang menjamin kesetaraan, menjadi komoditas pasar (*market commodities*) yang eksklusif. Hal ini berpotensi memperburuk stratifikasi sosial, memperlebar jurang ketimpangan, dan secara permanen menghambat mobilitas vertikal masyarakat berpenghasilan rendah yang terjebak dalam siklus kemiskinan struktural.

Kata Kunci: Ketersediaan Pendidikan, Rasio Kritis, Medan Tembung

PENDAHULUAN

Pendidikan, sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara dan berbagai kerangka hak asasi manusia global, diakui bukan sekadar sebagai kebutuhan sekunder, melainkan sebagai instrumen fundamental untuk pemenuhan diri (*self-actualization*) dan satu-satunya sarana yang terbukti efektif untuk mobilitas sosial vertikal. Dalam konteks visi pembangunan nasional jangka panjang, pendidikan berkualitas yang merata adalah prasyarat mutlak untuk mengonversi bonus demografi menjadi dividen ekonomi. Namun, jika prasyarat infrastruktur dasar ini gagal dipenuhi di tingkat lokal, bonus demografi tersebut berisiko bermutasi menjadi bencana demografi, ditandai dengan tingginya angka putus sekolah dan pengangguran muda.

Dalam perspektif perencanaan wilayah kota (*urban planning*), ketersediaan fasilitas pendidikan publik yang proporsional dengan densitas penduduk bukan sekadar masalah teknis pengadaan infrastruktur sipil. Lebih jauh dari itu, ia adalah indikator utama dari keadilan spasial (*spatial justice*). Sebuah kota yang gagal menyediakan ruang belajar yang cukup bagi warganya adalah kota yang sedang merencanakan kegagalan sosial di masa depan. Ketidakmampuan kota untuk memfasilitasi akses pendidikan dasar dan menengah mencerminkan disfungsi tata kelola perkotaan yang serius, di mana hak atas kota (*right to the city*) tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh penghuninya.

Saat ini, Indonesia tengah berupaya mereformasi sistem pendidikannya melalui kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Filosofi dasar kebijakan ini sangat mulia: menghapus kastanisasi sekolah ("sekolah favorit" vs "sekolah buangan") dan mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat setempat. Kebijakan ini berasumsi bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas di dekat rumahnya. Namun, keberhasilan kebijakan berbasis spasial ini sangat bergantung pada satu prasyarat mutlak (*condition sine qua non*): ketersediaan fisik sekolah negeri (*physical availability*) yang berkapasitas memadai dan tersebar merata. Tanpa *supply* unit sekolah yang cukup, zonasi berubah fungsi dari alat pemerataan menjadi mekanisme seleksi yang brutal. Alih-alih mendekatkan siswa ke sekolah, zonasi justru menjadi tembok penghalang bagi siswa yang tinggal di wilayah padat penduduk namun minim fasilitas sekolah negeri.

Tantangan ini terasa sangat akut dan nyata di wilayah peri-urban seperti Kecamatan Medan Tembung. Sebagai wilayah transisi desa-kota yang menyerap limpahan penduduk, kecamatan ini mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan laju pembangunan fasilitas publik (*infrastructural lag*). Kegagalan negara dalam menyediakan "kursi" sekolah negeri—sebagai



representasi pendidikan yang terjangkau, gratis, dan berkualitas standar—memaksa masyarakat untuk beralih ke mekanisme pasar, yakni sektor privat. Hal ini menciptakan hambatan aksesibilitas finansial (*financial accessibility barriers*) yang signifikan bagi keluarga rentan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara presisi besaran defisit layanan tersebut melalui perhitungan *Critical Ratio* (Rasio Kritis) dan membedah implikasi sosial dari ketimpangan struktural yang terjadi berdasarkan data terbaru tahun 2024.

Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis fenomena ketimpangan ini secara mendalam dan melampaui sekadar pembacaan data statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan sintesis kerangka teori yang multidimensi:

1. Kewajiban Ketersediaan (Availability Obligation) - Kerangka 4-A

Katarina Tomasevski (2001), Pelapor Khusus PBB, merumuskan kerangka 4-A (Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability) sebagai standar pemenuhan hak atas pendidikan. Pilar pertama dan paling fundamental adalah Availability (Ketersediaan). Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menyediakan institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang cukup (*sufficient quantity*) untuk menampung seluruh populasi usia sekolah di wilayah yurisdiksinya.

Ketersediaan ini mencakup aspek fisik (gedung sekolah, ruang kelas), aspek sumber daya (guru, buku), dan aspek sanitasi. Jika rasio siswa per sekolah melampaui batas kewajaran pedagogis, atau jika ada wilayah yang sama sekali tidak memiliki sekolah jenjang tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia (*violation of conduct*). Ketersediaan fisik adalah prasyarat mutlak; tanpa gedung sekolah yang berdiri, aksesibilitas dan kualitas hanyalah wacana kosong.

2. Teori Akses dan Akomodasi (Theory of Access)

Penchansky dan Thomas (1981) dalam teori klasiknya mendefinisikan "akses" sebagai derajat kesesuaian (*degree of fit*) antara klien (masyarakat) dan sistem (layanan pendidikan). Dalam konteks Medan Tembung, dimensi yang paling relevan adalah *Accommodation*. Dimensi ini mengukur hubungan antara cara sumber daya penawaran diorganisasikan untuk menerima klien dengan persepsi klien tentang kesesuaian tersebut.

Secara spesifik, *Accommodation* menyoroti apakah kapasitas supply mampu menampung volume demand. Ketika supply (sekolah negeri) sangat rendah dibanding demand (siswa), terjadi hambatan akses sisi penawaran (*supply-side constraint*). Kondisi ini menciptakan antrean panjang, seleksi yang tidak rasional, dan penolakan massal. Dalam situasi ekstrem, sistem publik mengalami overload, yang memaksa masyarakat mencari alternatif di luar sistem (sektor swasta atau putus sekolah).

3. Reproduksi Sosial dan Komodifikasi Pendidikan

Pierre Bourdieu (1990) berargumen bahwa sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai agen "reproduksi sosial" yang melanggengkan struktur kelas yang ada, alih-alih menjadi agen perubahan. Dalam konteks di mana sekolah negeri berkualitas sangat langka, akses terhadapnya menjadi "modal budaya" yang diperebutkan dengan sengit.



Ketika barang publik (sekolah negeri) menjadi langka, terjadi proses komodifikasi pendidikan. Kelompok kelas menengah atas cenderung memenangkan kompetisi masuk sekolah negeri melalui berbagai modal yang mereka miliki. Sementara itu, kelompok miskin yang "kalah" dalam kompetisi zonasi terpaksa memilih antara dua opsi buruk: putus sekolah, atau masuk ke sekolah swasta murah berkualitas rendah (low-fee private schools). Sekolah swasta "ruko" ini seringkali tidak memiliki fasilitas memadai. Akibatnya, anak-anak miskin mendapatkan pendidikan kualitas rendah, yang mengarah pada pekerjaan upah rendah, melanggengkan siklus kemiskinan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio beban layanan (service load ratio analysis). Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran diagnostik yang akurat dan objektif mengenai kondisi infrastruktur pendidikan pada satu titik waktu tertentu.

Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder otoritatif tahun 2023/2024 yang berasal dari lembaga resmi negara, terdiri dari:

1. Data Demand (Sisi Permintaan)

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan*, publikasi "Kecamatan Medan Tembung Dalam Angka 2024".

Variabel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Usia Sekolah (PUS) yang telah dikelompokkan secara normatif sesuai usia pendidikan:

- a. 7–12 tahun untuk SD
- b. 13–15 tahun untuk SMP
- c. 16–18 tahun untuk SMA/SMK

2. Data Supply (Sisi Penawaran)

Sumber: *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta *EMIS* Kementerian Agama.

Variabel yang digunakan adalah jumlah unit sekolah negeri dan swasta per jenjang pendidikan yang beroperasi aktif.

Sesuai batasan penelitian yaitu fokus pada Wajib Belajar 12 Tahun, jenjang TK/RA tidak diikutsertakan dalam analisis.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan menggunakan Teknik Kalkulasi Rasio Beban Layanan (Critical Ratio), dengan rumus:

$$\text{Rasio Kritis} = \frac{\text{Total Penduduk Usia Sekolah (Demand)}}{\text{Jumlah Sekolah Negeri (Supply)}}$$

Indeks rasio ini digunakan sebagai proksi statistik untuk mengukur:



1. tingkat kompetisi layanan pendidikan,
2. potensi overcrowding (kepadatan berlebih), dan
3. tingkat tekanan (stress level) pada sistem pendidikan publik.

Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar indikasi bahwa sistem pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan layanan pendidikan dasar secara memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan dekonstruksi matematis dan analisis mendalam mengenai tekanan demografis terhadap fasilitas pendidikan publik di Kecamatan Medan Tembung. Data dasar dirangkum dalam tabel-tabel berikut untuk mempermudah pembacaan pola kesenjangan.

4.1. Penyajian Data: Peta Ketimpangan

Tabel 1. Data Kebutuhan (*Demand*): Anak Usia Sekolah di Medan Tembung

Jenjang Pendidikan	Kelompok Umur Ideal	Jumlah Anak (Jiwa)	Persentase Populasi
SD / Sederajat	7 - 12 Tahun	15.420	50,5%
SMP / Sederajat	13 - 15 Tahun	7.710	25,3%
SMA & SMK	16 - 18 Tahun	7.400	24,2%
Total Populasi Target	7 - 18 Tahun	30.530	100%

Sumber: Diolah dari BPS Kota Medan (2024).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Medan Tembung memiliki basis demografi muda yang sangat besar, dengan lebih dari 30.000 anak yang membutuhkan layanan pendidikan. Separuh dari populasi ini berada di usia SD, yang mengindikasikan bahwa tekanan terhadap fasilitas pendidikan akan terus berlanjut dan meningkat saat kohort ini bergerak naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel 2. Data Ketersediaan (*Supply*): Jumlah Sekolah (Tanpa TK)

Jenjang	Negeri (Unit)	Swasta (Unit)	Total Unit	Rasio Negeri:Swasta
SD/MI	13	43	56	1 : 3,3
SMP/MTs	5	30	35	1 : 6
SMA/MA	3	15	18	1 : 5
SMK	0	12	12	0 : 12
Total	21	100	121	1 : 4,7

Sumber: Diolah dari Dapodik & EMIS (2024).



4.2. Perhitungan Rasio Kritis dan Analisis Mendalam

Berdasarkan data di atas, berikut adalah perhitungan Rasio Persaingan untuk membedah realitas beban layanan dan implikasi sosiologisnya.

1. Rasio Kritis Agregat (Keseluruhan Jenjang)

- a. Total Kebutuhan (Demand): 30.530 anak
- b. Total Ketersediaan (Supply): 21 sekolah negeri

Perhitungan rasio kritis agregat dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Agregat} = \frac{30.530}{21} = 1.453,8 \approx 1.454 \text{ anak/sekolah}$$

Analisis Komprehensif:

Secara rata-rata makro, satu unit sekolah negeri di Medan Tembung diperebutkan oleh 1.454 anak. Angka ini harus dibaca dalam konteks kapasitas fisik bangunan yang realistik. Jika merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kapasitas ideal satu sekolah menengah (dengan asumsi 18 rombel x 32 siswa) adalah sekitar 576 siswa. Rasio 1:1.454 ini menunjukkan kondisi Overload Kapasitas sebesar 250% di atas batas kewajaran pedagogis.

Implikasi Kebijakan: Negara gagal menyediakan kursi yang cukup, sehingga secara sistematis "membuang" atau mengeksklusi sekitar 60-70% populasi anak usia sekolah dari sistem sekolah negeri. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk bergantung sepenuhnya pada sektor swasta, menjadikan pendidikan sebagai komoditas pasar alih-alih hak publik.

2. Rasio Kritis Jenjang SD (Pondasi yang Rapuh)

- a. Demand: 15.420 anak
- b. Supply: 13 SD Negeri

Perhitungan rasio kritis jenjang SD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio SD} = \frac{15.420}{13} = 1.186,1 \approx 1.186 \text{ anak/sekolah}$$

Analisis:

Setiap SD Negeri di wilayah ini menanggung beban populasi potensial sebanyak 1.186 anak. Ini adalah angka yang sangat masif untuk tingkat pendidikan dasar yang membutuhkan interaksi intensif guru-siswa.

Konsekuensi Pedagogis (Double Shift): Untuk menampung jumlah siswa yang membludak ini, sekolah hampir pasti dipaksa menerapkan sistem *Double Shift* (masuk pagi dan siang/sore) secara permanen. Studi pendidikan menunjukkan bahwa sistem *shift* ganda ini seringkali mereduksi jam belajar efektif siswa, meniadakan kegiatan ekstrakurikuler yang penting untuk pengembangan karakter, dan mempercepat kelelahan fisik maupun mental guru (*teacher burnout*). Akibatnya, kualitas pendidikan dasar negeri menjadi terkompromi.

Persaingan Dini: Meskipun program wajib belajar 9 tahun menjamin pendidikan dasar gratis, rasio ini menunjukkan bahwa akses ke SD Negeri pun sudah sangat kompetitif sejak usia dini.



3. Rasio Kritis Jenjang SMP (Bottleneck Sistemik)
 - a. Demand: 7.710 anak
 - b. Supply: 5 SMP Negeri

Perhitungan rasio kritis jenjang SMP adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio SMP} = \frac{7.710}{5} = 1.542 \approx 1.542 \text{ anak/sekolah}$$

Analisis:

Terjadi lonjakan rasio yang signifikan, di mana beban per sekolah naik drastis dari 1.186 (di SD) menjadi 1.542 (di SMP).

Fenomena Leher Botol (Bottleneck): Ini adalah titik penyempitan akses yang paling krusial dalam trajektori pendidikan anak. Lulusan dari 13 SD Negeri (ditambah lulusan dari puluhan SD Swasta) harus berebut masuk ke "lubang jarum" yang hanya terdiri dari 5 SMP Negeri.

Guncangan Ekonomi Keluarga: Transisi dari SD ke SMP ini sering menjadi momen "guncangan ekonomi" bagi keluarga miskin. Jika anak mereka gagal lolos seleksi masuk SMP Negeri yang sangat ketat, mereka dihadapkan pada biaya masuk sekolah swasta yang seringkali tidak terjangkau. Hal ini meningkatkan risiko putus sekolah (*dropout rate*) justru pada usia transisi remaja (13-15 tahun).

4. Rasio Kritis Jenjang SMA/SMK (Krisis Absolut dan Zona Buta)
 - a. Demand: 7.400 anak
 - b. Supply SMA Negeri: 3 unit
 - c. Supply SMK Negeri: 0 unit

Perhitungan rasio kritis untuk jenjang pendidikan menengah atas dilakukan dengan menggabungkan ketersediaan SMA dan SMK negeri:

$$\text{Rasio SMA/SMK (Gabungan)} = \frac{7.400}{3} = 2.466,6 \approx 2.467 \text{ anak/sekolah}$$

Analisis Spesifik:

1. Tingkat Persaingan SMA yang Tidak Rasional: Rasio 1:2.467 adalah angka yang ekstrem dan tidak rasional. Peluang seorang siswa untuk diterima di SMA Negeri menjadi sangat kecil secara statistik, menyerupai mekanisme "lotere nasib" daripada pemenuhan hak warga negara. Kondisi ini memicu kecurangan administrasi (seperti manipulasi KK) demi menembus zonasi.
2. Tragedi SMK (Infinite Ratio / Hambatan Absolut)

Untuk jenjang pendidikan vokasi (SMK), perhitungan rasio layanan secara matematis menghasilkan:

$$\frac{X}{0} = \text{Tak Terhingga}$$

Ketiadaan SMK Negeri di Kecamatan Medan Tembung menyebabkan rasio layanan menjadi tak terhingga (infinite). Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan adanya Hambatan Akses Absolut, yaitu situasi di mana peserta didik sama sekali tidak memiliki alternatif layanan pendidikan vokasional negeri dalam wilayah mereka.



Implikasi Sosiologis (Bourdieu): Pendidikan vokasi (SMK) secara historis didesain sebagai jalur mobilitas sosial bagi anak-anak kelas pekerja (*working class*) untuk mendapatkan keterampilan siap pakai. Ketika negara absen total menyediakan SMK (0 unit), maka anak-anak miskin kehilangan tangga sosial mereka. Mereka dipaksa masuk ke pasar tenaga kerja sebagai tenaga tidak terampil (*unskilled labor*) yang rentan eksloitasi, atau harus berhutang demi masuk SMK Swasta. Ini adalah mekanisme reproduksi kemiskinan antar-generasi yang diciptakan oleh kelalaian perencanaan kota.

Hegemoni Swasta dan Ilusi Pilihan

Data Tabel 2 memperlihatkan rasio sekolah Negeri:Swasta sebesar 1:4,7. Artinya, untuk setiap 1 sekolah negeri yang berdiri, terdapat hampir 5 sekolah swasta yang mengepungnya. Dominasi sektor privat yang mencapai 80% lebih ini mengonfirmasi bahwa pendidikan di Medan Tembung telah bergeser dari Public Good menjadi komoditas pasar.

Dalam pasar ini, seringkali tercipta "ilusi pilihan" (illusion of choice). Masyarakat seolah memiliki banyak pilihan sekolah (swasta), padahal mereka memilih swasta bukan karena preferensi kualitas, melainkan karena keterpaksaan akibat terusir dari sistem negeri. Hal ini mempertegas segregasi sosial, di mana anak-anak terkotak-kotak berdasarkan kemampuan dompet orang tua, bukan potensi akademik mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris yang tak terbantahkan mengenai adanya kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara dalam penyediaan layanan publik di Kecamatan Medan Tembung.

1. Dengan Rasio Kritis Agregat 1:1.453, infrastruktur pendidikan publik di wilayah ini berada dalam kondisi kolaps secara fungsional, tidak mampu menampung beban demografis yang ada.
2. Ketiadaan unit SMK Negeri (0 unit) adalah bentuk ketidakadilan spasial yang fatal, yang secara langsung memutus akses mobilitas vertikal bagi pemuda dari keluarga berpenghasilan rendah.

Rekomendasi Mendesak:

Pemerintah Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara harus segera melakukan intervensi supply-side yang agresif. Solusi "business as usual" tidak lagi memadai. Diperlukan pembangunan unit sekolah baru (USB), khususnya SMK Negeri, serta optimalisasi aset lahan tidur pemerintah untuk dikonversi menjadi fasilitas pendidikan vertikal, guna).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Syaifullah, M. (2022). Pilihan Sekolah dan Stratifikasi Sosial: Dampak Pertumbuhan Sekolah Swasta terhadap Kesenjangan Akses Pendidikan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 9(1), 45-60.
- Aristo, T. J. V., & Meo, F. I. (2020). Analisis sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sebagai pemerataan pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 4(3), 249–254.



Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. (2024). *Kecamatan Medan Tembung Dalam Angka 2024*.

Medan: BPS Kota Medan.

Bourdieu, P. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage Publications.

Hidayat, A., & Puspitasari, L. (2021). Analisis Spasial terhadap Pemerataan Fasilitas Sekolah Menengah Negeri di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 12(2), 115-128.

Junaedy, I. K. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 114–118.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The Concept of Access: Definition and Relationship to Consumer Satisfaction. *Medical Care*, 19(2), 127–140.

Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32–42.

Raharjo, S. (2020). Mengukur Hak atas Pendidikan: Menerapkan Kerangka 4-A Tomasevski di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(2), 205-220.

Setyawan, D., & Firdausi, F. (2021). Zonasi dalam perencanaan infrastruktur pendidikan di wilayah yang mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 80–94.

Simarmata, G., dkk. (2025). Analisis Kasus Kesenjangan Pendidikan Dalam Perspektif Sila Ke-5 Pancasila: Studi Kasus SMA Antara Wilayah Kota Maju dan Daerah 3T. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences*, 2(2).

Sutanto, S. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Kajian Literatur Mengenai Penyimpangan dan Implikasinya. *Jurnal Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1-10.

Tomasevski, K. (2001). *Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme*. Lund: Raoul Wallenberg Institute.

Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225.